

BAB I

PENDAHULUAN

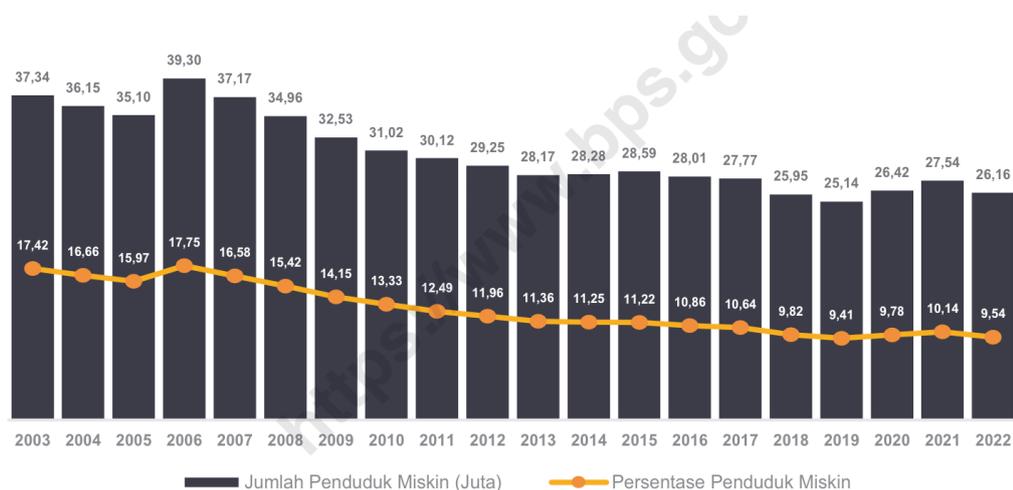
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa dihindari di banyak negara berkembang di dunia seperti negara Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India, Brazil dan lainnya. Semua negara sepakat bahwa permasalahan kemiskinan menjadi perhatian setiap negara karena bukan hal baru masalah kemiskinan ini seperti halnya di Indonesia, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan. Masalah kemiskinan menghambat kesejahteraan dan peradaban. (Santi,dkk. 2022)

Permasalahan kemiskinan di negara ini bukan sekedar permasalahan klasik yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, karena kemiskinan menghalangi seorang individu atau sekelompok orang mempunyai hak asasi manusia atas akses penuh terhadap kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, makanan yang cukup dan pasokan air minum. (Santi,dkk. 2022)

Angka kemiskinan di Indonesia secara nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa pada bulan Maret 2022 populasi penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan mencapai jumlah sekitar 26,16 juta jiwa (9,54%), turun dibandingkan pada tahun Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang (10,14 persen). Jumlah penduduk berkurang di perkotaan sebanyak 0,35 juta

orang, di pedesaan berkurang 0.81 juta orang. Perkembangan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2003 hingga tahun 2022 mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun presentasi, kecuali tahun 2006, 2014, 2015, 2020 dan 2021.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2003 hingga 2022

Sumber: Buku BPS Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2022

Kemiskinan juga dapat berdampak pada negara, apalagi mengingat tingginya angka kemiskinan, yaitu 1) meningkatnya angka pengangguran, 2) banyaknya anak putus sekolah, 3) timbul berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat, 4) kualitas generasi penerus menurun, 5) terjadinya perilaku kriminal. Situasi kemiskinan ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara. Karena kemiskinan dapat menyebabkan anak-anak kehilangan keterampilan yang mereka perlukan Untuk mempertahankan eksistensi dan tumbuh dengan baik, individu perlu melindungi diri mereka dari berbagai ancaman seperti eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Anak-anak, dalam konteks ini, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap

risiko tersebut, dan perlindungan khusus diperlukan untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan mereka terjaga.

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan dengan memperkuat berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Inisiatif pemerintah dalam berupaya mengatasi masalah permasalahan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Program ini diperkenalkan pada tahun 2007 dan berfokus pada pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang berada dalam situasi ekonomi yang rendah. Bantuan tersebut diberikan kepada penerima yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepada suatu keluarga atau seseorang yang menerimanya. Keluarga atau seseorang yang menerima bantuan PKH disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai KPM. Permensos No. 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat terpenting untuk dapat menerima bantuan PKH adalah yang pertama berdasarkan kesehatan yaitu kesehatan ibu hamil/menyusui yang memerlukan perhatian khusus terkait kesehatannya dan anak-anak dengan rentang usia 0 hingga 6 tahun yang membutuhkan dukungan kesehatan. Berdasarkan Pendidikan yaitu anak yang sedang menempuh pendidikan dasar atau setara, anak yang sedang menempuh pendidikan menengah pertama atau setara, anak yang sedang menempuh pendidikan menengah atas atau setara, dan anak yang berusia antara 6 hingga 21 tahun dan belum menyelesaikan 12 tahun wajib belajar. Berdasarkan kesejahteraan

sosial meliputi individual lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dan orang dengan kondisi distabilitas yang memerlukan dukungan khusus dalam aspek sosial

Permensos juga menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan atau memutus rantai kemiskinan merujuk pada siklus berkelanjutan di mana keadaan miskin dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memutus rantai ini, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui pendekatan ini, bantuan dan dukungan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan, dengan fokus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, perubahan perilaku yang tidak mendukung pertumbuhan kesejahteraan masyarakat miskin juga menjadi hal yang penting. Ini melibatkan edukasi, pembentukan kesadaran, dan pengenalan praktik yang lebih positif guna memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini memiliki tujuan jangka pendek untuk meredakan beban yang dihadapi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghentikan siklus kemiskinan.

Dalam pelaksanaan PKH, pendamping memegang peran krusial dalam memastikan keberhasilan program ini. Sesuai dalam SK Pendamping Sosial 2018 bahwa Pendamping PKH adalah tenaga manusia yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM). Pendamping PKH seharusnya berkomunikasi langsung dengan KPM karena mereka bertanggung

jawab memberikan informasi dan meningkatkan sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi KPM. Pendamping pun mendukung KPM agar dapat mengembangkan perubahan dalam pola perilaku serta kemampuan individu untuk secara mandiri memanfaatkan layanan-layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Permensos juga menyampaikan bahwa Pelaksanaan P2K2 diberikan pada tiap sebulan. Dengan proses pembelajar terstruktur untuk mengubah perilaku pada KPM. P2K2 terdiri dari Kelima modul ini membentuk fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap modul memiliki peran masing-masing dalam memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu untuk mengelola aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka. modul pendidikan dan pengasuhan anak memberikan pedoman tentang bagaimana memberikan dukungan pendidikan yang tepat bagi perkembangan anak. Sementara itu, modul pengelolaan keuangan keluarga memberi wawasan dalam mengelola sumber daya finansial secara efektif. modul kesehatan dan gizi menggarisbawahi pentingnya perawatan kesehatan dan pola makan yang seimbang. modul perlindungan anak memfokuskan pada perlindungan hak dan keselamatan anak-anak, terakhir, modul kesejahteraan sosial bertujuan memberikan pemahaman mengenai pilihan dan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam gabungan kelima modul ini, diharapkan individu mampu membentuk fondasi yang kuat untuk hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan modul pengasuhan dan pendidikan anak yang terdiri dari 4 sesi yaitu: 1) Menjadi orang tua yang lebih baik yang memuat untuk 2) Memahami

perkembangan dan perilaku anak 3) Memahami cara anak usia dini belajar 4) Membantu anak sukses di Sekolah. Modul ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya menerapkan pola asuh yang efektif di rumah serta menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mencapai kesuksesan masa depan anak-anak. Karena modul pengasuhan dan pendidikan anak menjadi modul prioritas yang harus diberikan kepada KPM maka dari itu peneliti ingin berfokus pada modul terkait.

Desa Pagerwangi adalah desa yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 10.690 jiwa dan jumlah keluarga miskin yaitu sebanyak 523 KK dan yang termasuk dalam bantuan PKH sebanyak 345 KK yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Pagerwangi. Dan sesuai hasil peninjauan peneliti menemukan terdapat 3 anak yang stunting dan 15 anak putus sekolah. Dan 18 anak itu merupakan anak dari KPM PKH.

Permasalahan itu dapat di temukan atau terjadi dikarenakan ada KPM yang tidak hadir dalam P2K2 dengan alasan karena kerja maka waktunya bentrok dan jarak dari rumah ke tempat pertemuan yang cukup jauh, ada juga untuk anak putus sekolah itu karena anaknya yang tidak ingin melanjutkan lagi sekolah karena anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Para KPM pun ada yang sudah melakukan P2K2 dan mengikuti namun sampai ke rumah atau waktu pulang dari pertemuan itu materi yang di berikan oleh pendamping lupa maka dari itu KPM tidak dapat menerapkan materi-materi yang diberikan oleh pendamping ke kehidupannya. Karakteristik KPM dari segi kondisi perekonomian ini yang sehingga mereka sulit untuk menerima materi yang diberikan oleh pendamping

seperti tingkat pendidikan yang rendah atau bisa juga karena penyampaian pendamping yang kurang di mengerti oleh KPM sehingga mereka tidak dapat menerima materi tersebut.

Akibat dari permasalahan ini adalah jika anak yang putus sekolah maka mereka tidak dapat memenuhi hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan jika sang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka mereka tidak akan berkembang karena Ijazah yang dimiliki rendah dan mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang rendah dengan bayaran atau gaji yang kecil. Untuk anak stunting ini karena Jabar Zero New Stunting maka lebih baik jika di Desa Pagerwangi ini bisa lagi untuk mengurangi angka stunting.

Implementasi atau penerapan, umumnya merujuk pada pelaksanaan tindakan tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi merujuk pada rangkaian keputusan yang saling terhubung yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah. Keputusan-keputusan ini biasanya diambil untuk menerapkan suatu kebijakan, program, atau aksi tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. dan di bangun di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan bidang lainnya. Dalam perspektif Edward yang diutarakan oleh Subarsono, implementasi kebijakan memuat empat model yang memiliki peran masing-masing. Pertama, model komunikasi mengilustrasikan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada pemahaman yang jelas oleh para pelaksana tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul. Kedua, model sumber daya menegaskan pentingnya aspek ini dalam meningkatkan efisiensi implementasi

kebijakan. Ini termasuk sumber daya manusia, termasuk kompetensi pelaksana, dan sumber daya finansial. Ketiga, model disposisi melibatkan karakteristik dan sifat-sifat para pelaku, seperti komitmen, integritas, dan pendekatan yang demokratis. Keempat, model struktur birokrasi menyoroti pengaruh penting struktur organisasi terhadap implementasi kebijakan. Salah satu komponen utama di setiap organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berfungsi sebagai panduan untuk tindakan semua pihak yang terlibat.

Dalam latar belakang permasalahan tersebut, peneliti berkeinginan untuk lebih mengetahui mengenai implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berfokus pada modul pengasuhan dan pendidikan anak yang berdampak pada perilaku atau pemahaman keluarga terutama orang tua agar dapat mengoptimalkan pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Selain itu, masalah-masalah ini dijelaskan dan sub-masalah berikut:

1. Bagaimana komunikasi pendamping PKH untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

2. Bagaimana kompetensi pendamping PKH untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana komitmen pendamping PKH untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum ialah mendapatkan gambaran tentang pengimplementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Komunikasi pendamping untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui kompetensi pendamping untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

3. Komitmen pendamping untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
4. Mengetahui *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengubah perilaku peserta PKH dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan yang dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada ilmu pemberdayaan masyarakat dan juga menjadi dokumen mengenai pentingnya program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4.2. Manfaat praktis

Temuan dari Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan bagaimana implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi penelitian tentang implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN, mencantumkan konteks tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, berisi uraian sistematis mengenai penelitian-penelitian terdahulu serta memuat teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti dari berbagai pakar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Beberapa tinjauan pustaka yang disertakan dalam penelitian ini mencakup tinjauan tentang implementasi kebijakan, tinjauan tentang Program Keluarga Harapan, Tinjauan tentang kinerja pendamping, Tinjauan tentang pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Tinjauan tentang pengasuhan anak, Tinjauan tentang Pekerja Sosial dan Tinjauan tentang Workshop

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi desain penelitian, ruang lingkup dan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, langkah- langkah dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA, berisi gambaran umum lokasi penelitian termasuk letak geografis, kondisi demografi serta potensi dan sumber daya desa. Tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V USULAN PROGRAM, meliputi dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik,

kegiatan yang akan dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dan saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

